



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIKI ZENAL ABIDIN
2. Jabatan : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TANGERANG II
3. NHK : 133393

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.785.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/40 m2 di KAB / KOTA
CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/70 m2 di KAB / KOTA
CIANJUR, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. Tanah Seluas 1.183 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI
Rp. 115.000.000
4. Tanah Seluas 751 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI
Rp. 40.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/147 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
6. Tanah Seluas 510 m2 di KAB / KOTA CIANJUR, HASIL SENDIRI
Rp. 240.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 520.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 553.330.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 25.000.000

Sub Total Rp. 2.883.330.000

III. HUTANG Rp. 448.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

2.435.330.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD WALIYUL AZMAN NUR RITONGA
2. Jabatan : PELELANG AHLI MADYA KPKNL TANGERANG II
3. NHK : 130007

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.600.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 264 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
190.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 679.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 323.431.147

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.823.031.147

III. HUTANG Rp. 26.555.604

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.796.475.543

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.